



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**
PROVINSI JAWA TIMUR

2025

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

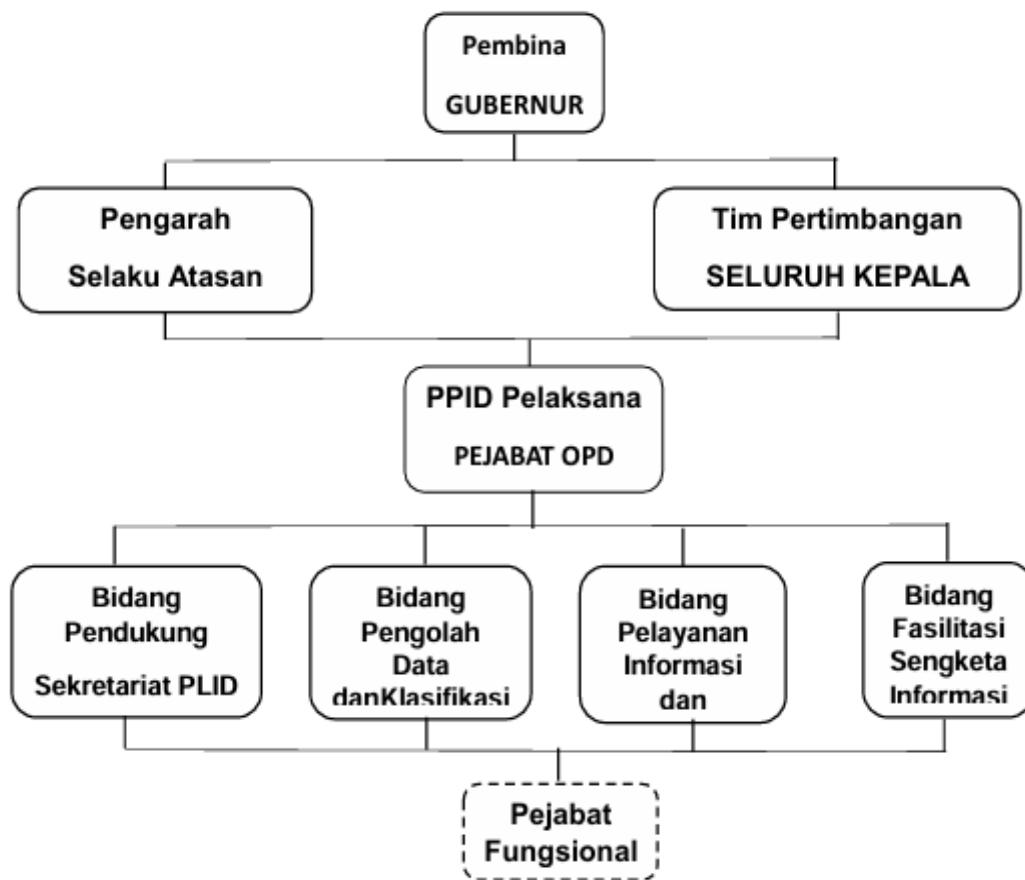
Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap badan publik Pemerintah maupun badan publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai badan publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk badan publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala badan publik/OPD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Nomor 500.12.18.1/211/KPTS/125.1/2025.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur :



Tugas PPID Pelaksana:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau Surat Permohonan Informasi dari Instansi/Perusahaan/Universitas/Perseorangan.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

2.1.1 Website (<https://disperindag.jatimprov.go.id/>)

2.1.2 Email (disperindag@jatimprov.go.id)

2.1.3 Facebook (disperindag jatim)

2.1.4 Instagram (disperindagprovjatim)

2.1.5 X @indag_jatim

2.1.6 Laporan

2.1.7 Tiktok (disperindagjatim)

2.1.8 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor

2.1.9 Youtube (DisperindagJatim)

2.2 SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Secara operasional PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) yaitu :

ASN	: 14 orang	PTT-PK	: 4 orang
Laki-laki	: 15 orang	Jabatan Struktural	: 4 orang
Perempuan	: 4 orang	Jabatan Fungsional	: 7 orang
Sarjana	: 15 orang	Lainnya	: 8 orang
SLTA	: 4 orang		

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

2.3.1 SOP Permintaan Informasi Publik;

2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;

2.3.3 SOP Pengumuman

2.3.4 SOP Pengujian Konsekuensi;

2.3.5 SOP Maklumat Pelayanan

2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

2.3.7 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

2.4 Waktu Pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 15.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

B A B III
Rincian Pelayanan Informasi

NO.	NAMA PEMOHON INFORMASI	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN/ALASAN PENOLAKAN
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	
1	1/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
2	2/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
3	3/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
4	4/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
5	5/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
6	6/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
7	7/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
8	8/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
9	9/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
10	10/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
11	11/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
12	12/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
13	13/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
14	14/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
15	15/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
16	16/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
17	17/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
18	18/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
19	19/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-
20	20/PPID/INDAGJATI M/2025	1 Hari	√	-	-	-

21	21/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
22	22/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
23	48/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
24	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
25	23/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
26	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
27	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
28	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
29	24/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
30	25/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
31	26/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
32	27/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
33	31/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
34	28/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
35	30/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
36	29/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
37	32/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
38	33/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
39	35/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
40	34/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
41	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
42	49/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
43	36/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
44	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-

45	37/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
46	42/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
47	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
48	38/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
49	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
50	39/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
51	40/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
52	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
53	41/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
54	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
55	45/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
56	50/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
57	43/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
58	44/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
59	47/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
60	46/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
61	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
62	51/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
63	54/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
64	52/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
65	53/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
66	55/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
67	58/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
68	57/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
69	56/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
70	59/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-

71	63/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
72	60/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
73	61/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
74	62/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
75	64/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
76	65/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
77	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
78	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
79	66/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
80	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
81	67/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
82	68/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
83	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
84	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
85	69/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
86	73/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
87	70/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
88	72/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
89	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
90	71/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
91	74/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
92	/PPID/INDAGJATIM /2025	1 Hari	√	-	-	-
93	75/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
94	76/PPID/INDAGJAT IM/2025	1 Hari	√	-	-	-
Jumlah			94 Permohonan	0 permohonan	0 permohonan	

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025

No.	Tanggal	Nama Pemohon	Informasi yang diminta	Tujuan Permintaan	Format Permintaan	Cara Mendapatkan Informasi
1	2025-01-06	Yusian Mutiara	Tata cara Izin Usaha sektor industri KBLI 22220	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
2	2025-01-15	Ryan Pratama Putra	Tata cara Izin Usaha sektor industri KBLI 23963 Crasher Batu Andesit	Mendapatkan Izin Usaha Sektor Industri melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
3	2025-01-16	Afriandy Adrian	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
4	2025-01-30	Usrotul Fardah	Tata cara pelaporan tahap produksi melalui SIINas	Untuk pelaporan tahap produksi melalui SIINas	Terekam	Langsung
5	2025-02-04	Devita Indah	Data Perusahaan Industri di Jawa Timur	Canvasing	Terekam	email
6	2025-02-04	Mulyani Triasih	Tata cara pelaporan tahap produksi melalui SIINas	Untuk pelaporan tahap produksi melalui SIINas sesuai dengan format baru	Terekam	Langsung
7	2025-02-05	Djoko Sulistiyono	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
8	2025-02-07	MARTINA LUCIA	terkait SIINas	Pendampingan Aplikasi SIINas	Terekam, M lihat/Mem baca	Langsung
9	2025-02-12	Maya	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung

10	2025-02-12	Akbar Syancha Perwira	Permintaan Data Industri di Jawa Timur	Pengembangan Market dan Jaringan Distribusi di Jawa Timur	Terekam	email
11	2025-02-17	Dwi Setyo Nuningsih	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
12	2025-02-21	Reni Dwi Kusumawati	Veriifikasi Sertifikat Standar	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
13	2025-02-21	Regina Astarini Soedarsono	Data Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur	Penelitian Ujian Tengah Semester	Terekam	email
14	2025-03-03	Lintang Aulia Pindhahapsari	Aktivasi akun e-SKA	untuk pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA)	Terekam,M elihat/Mem baca	Langsung
15	2025-03-04	Benrico	Tata cara pelaporan tahap produksi melalui SIINas	Untuk pelaporan tahap produksi melalui SIINas	Terekam	Langsung
16	2025-03-11	Ainur Rofik	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA	Terekam	Langsung
17	2025-03-13	Leira Narulita	Data industri di Jawa Timur	Penelitian keperluan skripsi	Terekam	Langsung
18	2025-03-20	Dhimas Gandung Pamungkas	Tata cara mendapatkan Sertifikat Standar/ Izin melalui OSS dan SIINas	Untuk penerbitan Sertifikat Standar / Izin Terverifikasi melalui OSS RBA untuk PMA	Terekam	Langsung
19	2025-04-10	Dustin Bima Adjie	Permohonan bantuan survey data dan wawancara perdagangan antar wilayah	Penyelesaian tugas akhir/skripsi	Terekam	Langsung

20	2025-04-23	Agung Prasetyo Widyanarko	Data Perusahaan Industri di Jawa Timur	Pemasaran	Terekam	email
21	2025-05-06	Rudi Bagus Kartika	Tata cara pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/ Izin Sektor Industri melalui OSS dan SIINas	Penerbitan Sertifikat Standar/Izin Sektor Industri	Terekam	Langsung
22	2025-05-22	Endang Rahayu	Konsultasi pergantian email di SIINas	Melakukan pergantian email SIINas	Terekam	Langsung
23	2025-08-25	Dismas Tantra Sahadewa P	Konsultasi terkait Oss	Konsultasi	Terekam	Langsung
24	2025-05-26	ogi kurniawan	Konsultasi dokumen untuk KBLI	Konsultasi dokumen untuk KBLI	Terekam	email
25	2025-05-28	Enrico	Data Percetakan Digital printing Toko kertas cetak Toko plastik dan dus kue	Untuk memberikan penawaran barang	Terekam	email
26	2025-05-27	winatalia desti	konsul tanda daftar gudang	pendaftaran tdg	Terekam	email
27	2025-05-28	Muflih Ramadhani	KBLI	KBLI impor	Terekam	email
28	2025-06-04	Amituhu Soetowo	Tentang TKDN ik	Untuk pengurusan TKDN ik	Terekam	email
29	2025-06-10	Muslik Mahamura	konsultasi perijinan	konsultasi perijinan	Terekam	email
30	2025-06-12	Oryza	Konsultasi KBLI untuk Perizinan Berusaha Sektor Industri	Penerbitan Sertifikat Standar/Izin Sektor Industri	Terekam	Langsung
31	2025-06-17	Mahbub Fuadi	Konsultasi Kesesuaian KBLI dengan Bidang Usaha Perusahaan	Ada permintaan dari Kementerian Perindustrian Untuk Mencantumkan KBLI baru saat pengajuan PI Baja	Terekam	email

32	2025-06-19	Dian Palupi	Data Industri di Jawa Timur	Penelitian Ekonomi Kreatif	Terekam	Langsung
33	2025-06-25	Hendro Sudarwanto	Konsultasi	Masalah Siinas	Terekam	Langsung
34	2025-06-23	Mega Puspa Prasetya	Konsultasi	Konsultasi	Terekam	email
35	2025-06-25	Septy	Izin industri	Konsultasi izin industri	Terekam	Langsung
36	2025-06-24	Surya Kamswara	laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023	tugas evaluasi akhir semester Studi Pembangunan 2024 terkait efektivitas PPID	Terekam	Langsung
37	2025-06-30	Sriyatun	Konsultasi verifikasi izin usaha industri	Verifikasi izin usaha industri	Terekam	Langsung
38	2025-07-03	Hendro Sudarwanto	Konsultasi perijinan Siinas	Perijinan e licence	Terekam	Langsung
39	2025-07-14	Minuk	IUI dan SIINAS	Perijinan perusahaan	Terekam	Langsung
40	2025-07-14	Richo Sebtyanton o	Verifikasi standar teknis	Permohonan Izin	Terekam	Langsung
41	2025-07-18	Dony Sasmito	Masuk account	Username password	Terekam	email
42	2025-08-25	Achmad Fuad Pratama	Perizinan Produksi	Perizinan produksi	Terekam	Langsung
43	2025-07-22	Laura	Konsultasi siinas	Konsultasi	Terekam	Langsung
44	2025-07-22	HRD PT Forindopri ma Perkasa	Surat keputusan telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan usaha	Pemenuhan persyaratan standart industri	Terekam	email
45	2025-07-22	debby	Siinas	Perubahan wewenang IUI Gubernur via OSS	Terekam	Langsung

46	2025-08-06	Putri sihombing	Terkait pemenuhan komitmen di oss	Untuk menerbitkan izin di oss	Terekam	Langsung
47	2025-07-29	Dedy Irawan	Konsultasi SIINAS pendaftaran SNI	Konsultasi	Terekam	email
48	2025-07-30	Bram Thio	Konsultasi KBLI	Minta informasi no KBLI	Terekam	email
49	2025-08-01	Sugiyanto Sugiyanto	Berkaitan dengan perubahan NIB	Untuk export gula aren dan kelapa	Terekam	email
50	2025-08-04	Ho Thay Liong	Tata cara pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/ Izin Sektor Industri melalui OSS dan SIINas	Penerbitan Sertifikat Standar/Izin Sektor Industri	Terekam	Langsung
51	2025-08-05	SUKLISWA MTO	Data perusahaan Kertas, Tekstil, Dupa	Untuk promosi chemical.	Terekam	email
52	2025-08-05	Sunu Fakhriadi	Siinas	Siinas	Terekam	email
53	2025-08-06	Depas Nardiansyah	OSS / Sertifikat standart	Sertifikat standart	Terekam	Langsung
54	2025-08-08	Pakdhe Susanto	Sertifikat standart	Perijinan	Terekam	email
55	2025-08-20	Tiffani Andriana	- perubahan wewenang IUI-no.KBLI yg tidak muncul saat penginputan bahan baku pelaporan produksi SIINas	- perubahan wewenang IUI dari kabupaten ke provinsi- Pelaporan Tahap Produksi SIINas Triwulan 2 2025	Terekam	Langsung

56	2025-08-25	Yafie Abbas	Siinas	Konsultasi	Terekam	Langsung
57	2025-08-20	Uun Notaris	Konsultasi perihal SIINas	Konsultasi perihal kelanjutan pemenuhan komitmen SIINas	Terekam	Langsung
58	2025-08-20	Tri Wahyono	Konsultasi	Konsultasi sertifikat standart	Terekam	Langsung
59	2025-08-20	Randyarsa Irawan	PENGISIAN SIINAS	DIARAHKAN PENGISIAN SIINAS	Terekam	Langsung
60	2025-08-20	Alam Asrorul	Konsultasi	Sertifikat sni	Terekam	Langsung
61	2025-08-21	Wiwik supriyadi i	Info untuk mendapatkan rekomendasi untuk oss	Untuk memenuhi persyaratan	Terekam	email
62	2025-08-25	EKO HARNOWO	Pemenuhan persyaratan SIINAS	Surat keterangan siap beroperasi guna Sertifikat Standar	Terekam	Langsung
63	2025-08-29	shadiq firdaus	Siinas	Konsultasi	Terekam	Langsung
64	2025-08-28	BADRUS VIAN HERDIK SURYANTO	Oss	Oss	Terekam	Langsung
65	2025-08-28	IMONIQ Mineral Water	Konsultasi aplikasi SINAS dan pendaftaran izin OSS NIB	Untuk mengurus perizinan umkm usaha kami	Tercetak	Langsung
66	2025-09-03	Ati Kusumawati	Data Industri Rokok Wilayah Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo	Kajian Potensi Komoditas Tembakau di Wilayah Sekarkijang	Terekam	email
67	2025-09-22	Rio Danu Wicaksono	Surat Tanda Distribusi dan Surat Tanda Gudang	Untuk legalitas usaha	Terekam	Langsung

68	2025-09-22	MARCELL	SERTIFIKAT DILUAR KAWASAN	Hanya informasi	Terekam	Langsung
69	2025-09-22	tulus widiyanto	SIINAS	Proses pengajuan SKPBKI	Terekam	Langsung
70	2025-09-22	Putri Wahyu Waluyo	Pengambilan Data Industri Jawa Timur	Ujian Skripsi	Terekam	email
71	2025-10-07	Endang Sri Wilis	Konsultasi data penanggung jawab di sistem Inatrade Kemendagri tidak sesuai dengan KTP dan data di OSS	Pembetulan di sistem Inatrade disesuaikan data penanggung jawab dengan data yang di OSS	Terekam	Langsung
72	2025-09-25	panjaya sakti	Konsultasi Perizinan	Konsultasi Perizinan	Terekam	Langsung
73	2025-09-25	Putri Kartika Sari	Tata cara pengurusan Izin Usaha Sektor Industri PMA	Pengurusan Izin Usaha Sektor Industri PMA	Terekam	Langsung
74	2025-10-07	YUNATAN ANT	Konsultasi Sinas	Pengurusan sertifikat TKDN	Terekam	Langsung
75	2025-10-16	Dwi Anto Arief Rachman SH	Tata cara pelaporan SIINas	Untuk melakukan pelaporan Triwulan melalui SIINas	Terekam	Langsung
76	2025-10-16	Idriansyah Faquillaslam	Tata cara pelaporan SIINas	Untuk melakukan Laporan Industri melalui SIINas	Terekam	Langsung
77	2025-10-16	Recruitmen t Suprama	SIINAS	Konsultasi	Terekam	email
78	2025-10-16	Fazi	Konsultasi Siinas	Pengerjaan siinas	Terekam	Langsung
79	2025-11-12	Anthony Mulia	Pertek besi	Menanyakan	Terekam	email

80	2025-11-18	Najmi Khaleda	surat izin dan jumlah badan usaha di jawa timur	penelitian dan penyebaran kuisioner di instansi/ badan usaha kena pajak Jawa Timur	Terekam	email
81	2025-11-20	PT. HOH FOOD GLOBAL	Izin industri	Mengecek adanya izin industri	Terekam	email
82	2025-12-01	Dian Saputri	Terkait program oss dan siinas	Pendampingan program oss dan siinas	Terekam	email
83	2025-12-22	Hendi Purwantoro	Data base UMKM penghasil Aloe Vera di Jawa Timur beserta kontak personnya	Mencari UMKM untuk kerjasama produk olahan aloevera	Terekam	email
84	2025-12-02	andi hamzah lazuardy	Penawaran kerjasama media	Penawaran kerjasama media	Terekam	email
85	2025-12-03	dwi lidia	Konsultasi permintaan pembatalan pengajuan verifikasi nilai investasi	Untuk legalitas valid perusahaan	Terekam	Langsung
86	2025-12-17	Amanatus Solehah	Konsultasi	Konsultasi mengenai sertifikat standart terverifikasi industri	Terekam	Langsung
87	2025-12-09	Frisca Renata Tri Okawati	SK pengecualian kawasan industri	Penguruan Izin	Terekam	email
88	2025-12-17	Muhammad Nasrul	konsultasi perizinan melalui siinas	arahan untuk perizinan melalui siinas	Terekam	Langsung
89	2025-12-15	Yunita Trisnawati	Informasi arahan bila perizinan perluasan industri data pengecualian daerah kawasan industri ditolak	Arahan perizinan perluasan industri	Terekam	email

90	2025-12-16	Jefri Ignatius	Persyaratan aktivasi akun siinas	Aktivasi akun siinas	Terekam	Langsung
91	2025-12-18	Riawan Setia	masalah SIINas dan Nomor Pendaftaran Barang Kementerian Perdagangan	untuk meminta informasi cara menangani masalah Nomor Pendaftaran Barang Kementerian Perdagangan yang macet, dan juga masalah Permohonan di SIINas.	Terekam	Langsung
92	2025-12-18	Iwan Iwe	Oss	Oss	Terekam	email
93	2025-12-19	Mahbub Fuadi	Konsultasi KBLI	Pengurusan Persetujuan Impor	Terekam	Langsung
94	2025-12-30	Bilqist Elok Febriana	Data berupa rekapitulasi pelaku usaha kecil dan menengah Kota Malang tahun 2024, meliputi jumlah pelaku usaha, klasifikasi skala usaha, serta jenis usaha.	Sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1)	Terekam	email
JUMLAH				94		

3.1 Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan Dikabulkan seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Tidak Dikabulkan atau ditolak
2024	82	0	0
2025	94	0	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebanyak 94 permohonan dan dikabulkan seluruhnya.

3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2025 belum ada pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll ;
4. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

B A B V

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ), Kegiatan Verifikasi Faktual/Visitasi serta Tahap Presentasi dan Wawancara pada tahun 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 mulai melakukan perbaikan dan pembenahan di segala aspek, sehingga berhasil masuk kategori “Badan Publik Informatif” dengan nilai total 90.25 dan mendapat sertifikat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.



B A B VI

Kesimpulan

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

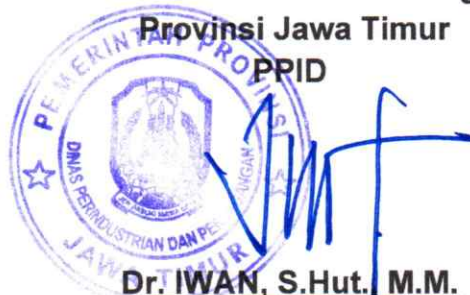
Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai badan publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai badan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai badan publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Timur

PPID



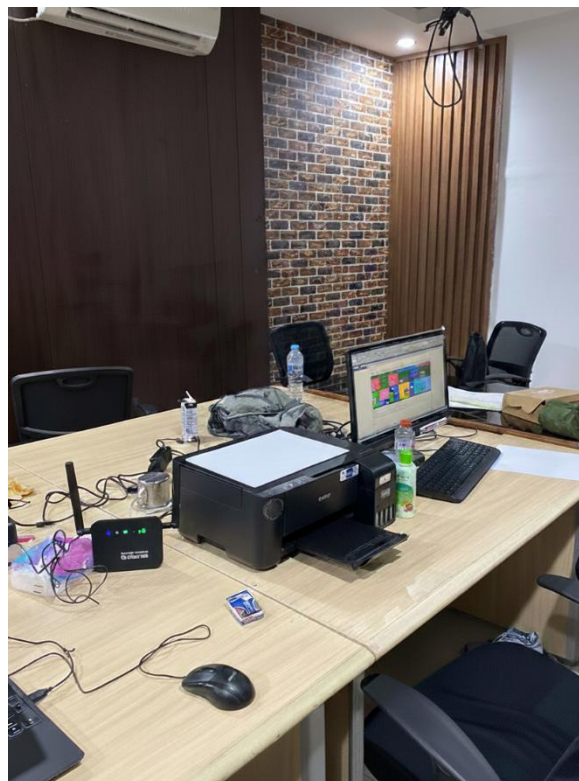
Dr. IWAN, S.Hut. M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19770216 199603 1 002

DOKUMENTASI PELAYANAN PPID

DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Ruang PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Timur



Kegiatan Visitasi Oleh Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur



Pelayanan Permohonan Informasi